

Jual beli kendaraan perorangan dinas milik negara berdasarkan keputusan presiden nomor 5/1983 pada departemen keuangan Republik Indonesia

Dudi Karnela, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20202014&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Bahwa terjadinya jual beli Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara yang didasarkan atas Keppres No. 5 Tahun 1983, sebenarnya dipengaruhi oleh situasi perekonomian Indonesia pada saat itu. yang dikaitkan dengan takad pGiiiGrintah di dalam melaksanakan pembangunan. Seperti kita ketahui bersama bahwa untuk melaksanakan pembangunan pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar guna untuk memblayal pembangunan. Dalam rangka pemupukan dana ini pemerintah berusaha meningkatkan adanya tabungan pemerintah. Tabungan pemerintah yaitu selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin. Oleh karena penerimaan pada saat itu tidak dapat diharapkan sepenuhnya dari ekspor minyak mengingat situasi pasar dan resesi dunia yang belum mereda, maka dalam hal penerimaan pemerintah berusaha mencari sumber-sumber pendapatan yang lain. Sedangkan di bidang pengeluaran khususnya pengeluaran rutin pemerintah berusaha mengadakan penghematan yang dilakukan dengan berbagai macam kebijaksanaan. Jadi pengeluaran rutin yang masih dapat dikurangi harus dikurangi agar dapat menyediakan tabungan pemerintah yang lebih besar guna untuk membiayai pembangunan yang didasarkan atas kekuatan sendiri. Salah satu kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dalam rangka penghematan yaitu itu dengan mengeluarkan Keppres No. 5 Tahun 1983 yang menghapuskan untuk seterusnya* kendaraan perorangan dinas milik negara dengan cara menjual kendaraan tersebut kepada para pejabat dan pemegang tetap dari kendaraan bersangkutan, mengingat bahwa untuk pengadaan dan pemeliharaan kendaraan perorangan dinas yang ada pada Departemen-departemen, lembaga-lembaga pemerintah non departemen dan instansi pemerintah lainnya membutuhkan biaya yang cukup besar dan hal ini merupakan beban bagi APBN.

<hr>